

Judul : Belikan BMKG Alat Deteksi Canggih
Tanggal : Rabu, 09 Januari 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Peringatan Dini Bencana Belikan BMKG Alat Deteksi Canggih

ANGGOTA Komisi V DPR Rendy Lamadjido mendorong pengadaan alat canggih dan berteknologi mutakhir pendeteksi bencana di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Rendy melihat, lemahnya peringatan bencana selama ini karena banyak alat deteksi milik BMKG tidak berfungsi dengan baik. Ada yang masa pakainya habis, ada yang rusak.

"Sejak 2007, BMKG telah mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 7 triliun untuk pengadaan peralatan pendeteksi bencana. Saat ini, peralatan tersebut saat ini sudah banyak yang kedaluarsa. Sehingga harus segera diganti," kata politisi PDIP ini di Jakarta, kemarin.

Rendy pun mendorong Pemerintah menambah anggaran untuk BMKG di APBN 2019. Anggaran untuk membeli alat deteksi. PDIP pun siap memperjuangkan penambahan anggaran itu. PDIP ingin BMKG semakin kuat. Dengan begitu, jumlah korban akibat bencana, terutama



Rendy Lamadjido

gempa bumi dan tsunami, bisa diminimalisir.

"Hal tersebut telah kami bicarakan dengan Menteri Keuangan. Beliau setuju untuk menambah dana dalam membeli peralatan yang dibutuhkan BMKG, selama peralatan tersebut berguna dalam mendeteksi gejala alam sebelum terjadinya bencana," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Rendy juga menyoroti kinerja Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dia melihat, BNPB belum maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penanggulangan bencana.

Dalam analisisnya, ada tiga penyebab utama yang membuat BNPB tidak maksimal menjalankan fungsinya. Pertama, belum siap menghadapi bencana. Kedua, belum siap melakukan penanggulangan korban setelah bencana. Ketiga, belum siap melakukan pemulihan setelah bencana terjadi. "Saya melihat BNPB gagal dalam mengantisipasi hal-hal ini," tudingnya.

Rendy berharap banyak ke BNPB dalam mengantisipasi bencana di Indonesia. Namun, dia tidak melihat ada koordinasi yang kondusif antara BNPB dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kalau masalahnya anggaran, dia pun siap membantu mengusulkan penambahan seperti BMKG.

"Secara teknis, penanggung

jawabnya (penanggulangan bencana) adalah BNPB. Kalau ada kebutuhan penambahan anggaran perawatan, harusnya dirembukan lagi dengan Komisi V DPR," katanya.

Rendy meminta BNPB menerapkan sistem manajemen bencana yang jelas. Tidak amburadul seperti sekarang ini. Dan yang paling penting, bagaimana meningkatkan koordinasi antarlembaga, utamanya dengan BMKG dalam mengantisipasi terjadinya bencana maupun penanganan pascabencana.

"Kita bisa belajar dari upaya penanganan bencana di Italia. Di sana, semua aktivitas gunung berapi terdeteksi dengan baik. Karena itu BNPB harus menerapkan sistem manajemen bencana yang jelas. Tidak amburadul seperti sekarang ini. Apakah akan menerapkan sistem disaster management center atau sistem disaster management official, atau crisis management system," tambah dia. ■ KAL